

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PETANI JAGUNG DI KECAMATAN BATANG
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diusulkan oleh

ARMAN NUR

Nomor stambuk : 10564 00825 10



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
JAGUNG DI KECAMATAN BATANG
KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Politik

Disusun dan diusulkan oleh

ARMAN NUR

Nomor stambuk : 10564 00825 10

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul : Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pemberdayaan Petani
Jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

Nama Mahasiswa : ARMAN NUR

Nomor stambuk : 10564 00825 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mappamiring, M.Si


Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan


Ir. H. Saleh Mollah, MM

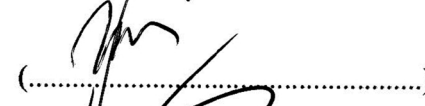

Andi Luhur Prianto, S. Ip, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh panitia ujian skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1691/FSP/A1-VIII/IV/36/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari jumat 24 Agustus tahun 2017.



TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
	
<u>Ir. H. Saleh Mollah, MM</u>	<u>Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si</u>
Penguji	
1. Dr. H. Mappamiring, M.Si	)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si	)
3. Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si	)
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si	)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ARMAN NUR

Nomor Stambuk : 10564 00825 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabut gelar akademik.

Makassar, 2 Desember 2016

Yang Menyatakan,

ARMAN NUR

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan skripsi ini di waktu yang akan datang.

Jeneponto, 2 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Pustaka	13
B. Kerangka Pikir	34
C. Deskripsi Fokus	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Informasi Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Pengabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Objek Pemerintah	40
B. Peran Pemerintah	45
C. Strategi penduduk	54
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sampai saat ini masih merupakan Negara agraris artinya sektor pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian yang penting. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian yang banyaknya sektor barang-barang komoditi yang berasal dari produksi pertanian. Lebih dari itu untuk mencapai industrialisasi sektor yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Di lihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian secara makro terjadi penurunan, di mana kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 2010 15,3 %, kemudian turun menjadi 14,7 %. Fenomena ekonomi ini memberikan isyarat terjadinya transformasi ekonomi pada perekonomian Indonesia secara makro baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan menurunnya tingkat produktifitas, luas area lahan pertanian yang secara tidak langsung menurunkan tingkat produksi pertanian khususnya pada produksi padi.

Jagung merupakan salah satu komoditas utama yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat terutama di Indonesia. Jumlah jagung yang diproduksi oleh masyarakat belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana cara

membudidayakan jagung yang benar dan baik dan tanah atau lahan untuk tanaman jagung telah banyak dialih fungsikan sebagai gedung-gedung dan lain-lain. Perusahaan swasta pun juga belum memproduksi jagung secara optimal. Jagung juga sebagai makanan pokok di suatu daerah tertentu dan diubah menjadi beberapa makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga kebutuhan akan jagung meningkat di masyarakat.

Hasil tanaman jagung juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masih belum optimalnya penyebaran varietas unggul dimasyarakat, pemakaian pupuk yang belum tepat, penerapan teknologi dan cara bercocok tanam yang belum diperbaiki. Usaha untuk meningkatkan produksi tanaman jagung adalah peningkatan taraf hidup petani dan memenuhi kebutuhan pasar maka perlu peningkatan produksi jagung yang memenuhi standard baik kualitas dan kuantitas jagung yang dihasilkan tetapi dalam melakukan hal tersebut perlu mengetahui atau memahami karakteristik tanaman jagung yang akan ditanam seperti morfologi, fisiologi dan agroekologi yang diperlukan oleh tanaman jagung sehingga dapat meningkatkan produksi jagung di Indonesia.

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan lahan yang luas dan hijau, yang tidak diragukan lagi komoditas pertaniannya. Tapi apakah semua kekayaan itu dapat kita jaga. kita olah dengan baik. Lalu seberapa besarkah peran dan kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar

pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

Menurut UU No 16 Tahun 2006 pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pertanian terbagi ke dalam pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti luas mencakup : Pertanian rakyat, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan. Dalam arti sempit pertanian diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga di mana diproduksinya bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayuran dan buah-buahan.

Pembangunan pertanian diperlukan faktor-faktor produksi yang mendukung, yang termasuk dalam faktor-faktor produksi pertanian adalah : tanah, tenaga kerja, modal, pengelolaan (*management*). Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha pertanian. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang baru, yaitu produksi pertanian. Sayangnya, aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber

permodalan yang disediakan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit dan petani tanpa lahan yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Dengan demikian, tidak jarang ditemui bahwa kekurangan biaya merupakan kendala bagi petani dalam mengelola dan mengembangkan usahatani.

Secara makro, pertanian Indonesia yang didominasi oleh usaha skala kecamatanil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani yang sebagian besar tingkat pendidikannya sangat rendah (87% dari 35 juta tenaga kerja pertanian berpendidikan SD ke bawah), berlahan sempit, bermodal kecamatanil dan memiliki produktivitas yang rendah, akan berdampak kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global, karena petani dengan skala kecamatan itu pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal yang selanjutnya berakibat pada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecamatanil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian adalah akses permodalan pada lembaga keuangan formal bagi petani, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Selama ini petani sangat erat hubungannya dengan rentenir atau sumber keuangan non formal yang dengan mudahnya mendapatkan dana namun disertai bunga yang tinggi. Bukan hanya sumber keuangan formal yang memiliki bunga yang tinggi, lembaga keuangan formal pun menetapkan standar suku bunga yang cukup tinggi. Untuk mendapatkan akses modal bagi petani sangatlah sulit, mengingat pertanian merupakan sektor dengan tingkat “ketidakpastian” dan resiko yang tinggi dikarenakan output yang dihasilkan lebih dipengaruhi oleh iklim. Selain itu juga petani di hadapkan pada persoalan bentuk agunan yang kurang mempunyai nilai bagi perbankan. Minimnya modal akan berimplikasi besar bagi perkembangan skala usaha tani dan juga dari sisi produktivitasnya. Kemampuan petani untuk membiayai usahataniya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Maka perlu perhatian khusus terkait dengan permodalan dan pembiayaan untuk mengembangkan usaha bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya khusus agar kesejahteraan petani miskin segera membaik. Salah satu bentuknya adalah melalui program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan untuk petani khususnya di daerah tertinggal atau miskin. Berdasarkan informasi awal tersebut, dilakukan suatu observasi spesifik dalam rangka menelaah penerapan program untuk mengendalikan jumlah petani di beberapa daerah terpencil dan nyaris tertinggal (*remote area*).

Peran sektor pertanian akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu, berkelanjutan, dan diimbangi dengan penyediaan anggaran. Untuk memperkuat posisi sektor pertanian, maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan sebuah keharusan. Fungsi modal dalam tataran tingkat mikro (usaha tani), tidak hanya salah satu faktor produksi melainkan juga berperan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengadopsi teknologi. Pada era teknologi pertanian yang semakin modern, penerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian yang semakin modern, penerahan modal yang intensif, baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi mungkin akan menjadi suatu keharusan. Bagi pelaku pertanian, situasi tersebut dapat kembali memunculkan masalah karena sebagian besar tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri. Salah satu ciri pertanian rakyat di Indonesia adalah manajemen dan permodalan yang terbatas. Rendahnya aksesibilitas petani terhadap layanan modal tersebut juga disebabkan lembaga permodalan yang ditunjuk untuk menyalurkannya tidak sepenuhnya berhak kepada petani, bunga yang terlalu tinggi, jaminan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi petani, proses pencairan yang memakan waktu sangat lama, birokrasi yang berbelit-belit, pelayanan yang tidak ramah seperti membuat petani lebih memilih untuk meminjam modal dari rentenir yang tidak perlu persyaratan rumit dan cepat dalam proses pencairannya. Oleh karena itu, sudah saatnya perlu dilakukan revitalisasi layanan permodalan melalui perombakan birokrasi kelembagaan khususnya jika hal itu berkaitan dengan petani karena fakta menunjukkan bahwa SDM petani Indonesia 81,7% tidak tamat dan sebagian tamat

sekolah dasar. Fakta ini lah yang menjadikan faktor mengapa aksesibilitas petani terhadap layanan usaha rendah.

Dari latar belakang tersebut, penulis mengkaji sektor pertanian secara umum dengan menitik beratkan pada permasalahan, kebijakan dan strategi dalam produksi pangan khususnya produksi jagung. Kita ketahui sektor pertanian ditopang oleh sub sektor lainnya, yakni sektor perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta tanaman pangan, di mana sektor tanaman pangan yang menjadi prioritas karena termasuk dalam kategori kebutuhan primer, maka tidak heran bila setiap negara khususnya negara Indonesia yang merupakan negara agraris setiap tahun berupaya untuk memaksimalkan sektor ini. Namun, kita sedikit bersedih karena sektor tersebut bukan sektor utama yang menyumbang dalam laju pertumbuhan PDB. Hal ini menandakan adanya transformasi dari sektor pertanian menuju sektor modern yang berarti lahan pertanian semakin sempit karena pesatnya pertumbuhan dan pembangunan gedung-gedung. Keadaan tersebut harus disikapi dengan segera mungkin dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga rakyat agar tidak bertambah masyarakat yang melarat dikarenakan pemerintah yang sibuk dengan rapat tanpa ada tindak perbuat.

Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji fakta apa yang menjadi penyebabnya. Pendapat secara umum mengatakan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani jagung. Apakah hal ini yang menjadi penyebabnya, masih perlu pengkajian. Dengan pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Thoha (2004) bahwa melalui informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman, akan

menimbulkan persepsi bagi seseorang melalui proses keorganisasiannya, dengan demikian diduga anggapan atau persepsi tentang petani jagung yang menjadi penyebab penurunan produktivitas usaha petani jagung tersebut. Dalam observasi deskriptif ini diterapkan tiga pendekatan yakni *Pertama*, pendekatan ekonomi untuk mengamati perkembangan penghasilan dan produksi petani. *Kedua*, pendekatan sosial-budaya digunakan dalam kaitan dukungan aspek-aspek kemasyarakatan dalam implementasi program pemberdayaan petani. *Ketiga*, pendekatan kelembagaan untuk mengamati peran dan fungsi kelembagaan sejalan dengan tujuan program pemberdayaan.

Lokasi observasi ditentukan secara sengaja (*Purposive sampling technique*) mengingat program pemberdayaan hanya terdapat pada lokasi tertentu saja. Lokasi dimaksud adalah Maccini Baji, Desa Kaluku dan Desa Bungeng yang berada di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Penyusunan strategi pemberdayaan petani miskin umumnya didasarkan pada pertimbangan permintaan dan penawaran. Pada satu sisi, bagaimana petani memproduksi barang dan jasa sesuai dengan potensi yang ada. Dalam kaitan ini potensi petani digolongkan sebagai faktor internal, sedangkan hambatan, tantangan dan permintaan pasar adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku. Dalam rangka pemberdayaan petani melalui upaya peningkatan produksi barang dan jasa, masih sangat diperlukan adanya intervensi dari pihak pemerintah atau swasta. Bagaimana bentuk campur tangan tersebut dan pada tahapan mana pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah atau swasta perlu ditentukan dengan tegas.

Hal ini untuk menghindari rasa ketergantungan petani terhadap pemerintah dan sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab pada para petani.

Snodgrass dan Wallace (1975) mendefinisikan kebijakan pertanian sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan structural, politik luar negeri, pemberian fasilitas dan pendidikan. Widodo (1983) mengemukakan bahwa politik pertanian adalah bagian dari politik ekonomi di sektor pertanian, sebagai salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat.

Menurut penjelasan ini, politik pertanian merupakan sikap dan tindakan pemerintah atau kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan pertanian. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, tingkat hidup petani lebih tinggi, dan kesejahteraan menjadi merata. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sarma (1985). Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan umum politik pertanian di Indonesia adalah untuk memajukan sektor pertanian, yang dalam pengertian lebih lanjut meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian
2. Peningkatan produksi pertanian

3. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani, serta pemerataan tingkat pendapatan.

Mubyarto (1987) menyebutkan bahwa politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian, yang tidak saja menyangkut kegiatan petani, tetapi juga perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi, serta lembaga-lembaga pemerintah dan semi pemerintah yang terkait dengan kegiatan sektor pertanian. Politik pertanian mempunyai kaitan sangat erat dengan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan efisiensi, serta pembangunan pedesaan yang menyangkut seluruh aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari penduduk pedesaan.

Dalam pembangunan nasional, sektor pertanian menempati prioritas penting. Sebagai komoditas pertanian, pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar, dianggap strategis, serta sering mencakup hal-hal yang bersifat emosional dan bahkan politis. Terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dalam jangka panjang.

Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian

dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi. Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap kebijakan petani jagung di desa Maccini Baji Kecamatan Batang?
2. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani jagung di desa Maccini Baji Kecamatan Batang?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah terhadap kebijakan petani jagung di desa Maccini Baji kecamatan Batang.
2. Untuk mengetahui srategi pemerintah dalam pemberdayaan petani jagung di desa Maccini Baji Kecamatan Batang.

D. Manfaat Penulisan

- a. Bagi masyarakat, untuk mengetahui manfaat jagung dalam upaya pengembangan tanaman jagung.
- b. Bagi instansi terkait, yaitu kemanfaatan berupa dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan, *input* bagi rumusan kebijakan program pembangunan wilayah di bidang pertanian, jaminan tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, adil, tepat sasaran dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan wilayah yang telah ditetapkan, adopsi teknik dan langkah perancangan pembangunan sektor ekonomi sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan pola pikir dalam kondisi yang sebenarnya serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) di Universitas Muhammadiyah Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan. Selain itu, pentingnya peranan jagung terhadap perekonomian nasional telah menempatkan jagung sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah padi dalam subsektor tanaman pangan.

1. Pengertian dan Lingkup Sektor Pertanian

Ensiklopedia Indonesia pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas yang meliputi tiga subsektor yaitu :

1) Subsektor Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan sering disebut subsektor pertanian rakyat karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat.

2) Subsektor Perkebunan

Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat ialah : Perkebunan

yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat biasanya dalam skala kecil-kecilan dan dengan teknologi yang sederhana. Perkebunan besar ialah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum.

3) Subsektor Kehutanan

Sub sektor kehutanan terdiri atas 3 macam kegiatan yaitu : 1. Jalur kapitalistik , yakni melalui pengembangan usaha tani. Usaha tani berskala besar dan melibatkan satuan-satuan yang berskala kecil. 2. Jalur sosialistik, yakni melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diprakarsai oleh negara. 3. Jalur koperasi semi kapitalistik yakni melalui pembinaan usaha tani-usaha tani kecil padat modal yang digalang dalam suatu koperasi nasional dibawah pengelolaan negara.

Salah satu teori yang menjelaskan peranan sektor pertanian dalam perekonomian adalah teori pertumbuhan ekonomi model Lewis tentang proses tranformasi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Teori pertumbuhan ekonomi Lewis diasumsikan bahwa terdapat kelebihan jumlah tenaga kerja dan perekonomian terdiri dari sektor industri (kapitalis) dan sektor pertanian atau disebut dengan sektor subsisten. Sektor ekonomi pertanian dicirikan dengan sektor yang memberikan tingkat produktifitas (*marginal physical product*) relatif lebih rendah daripada sektor industri karena jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian lebih banyak dengan tingkat keterampilan lebih rendah dibandingkan yang bekerja di sektor industri. Adapun menurut Kuznet sektor pertanian mampu menghasilkan surplus atau neraca pembayaran karena

sumbangannya terhadap ekspor maupun pengembangan produk substitusi impor dan ekspansi sektor non pertanian melalui penyediaan pangan dan bahan baku bagi industri pengolahan. Peranan penting pertanian antara lain adalah :

- a. Menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan.
 - b. Menyediakan bahan baku industri.
 - c. Sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan industri.
 - d. Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain.
 - e. Mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan
 - f. Menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan.
2. Strategi Pengembangan Petani Jagung

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, 2004:15). Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch,1989:9).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

- a. Pengertian Umum Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

b. Pengertian khusus Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan.

Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

1. Strategi Integrasi Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.
2. Strategi Intensif Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

3. Strategi Diversifikasi Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

4. Strategi Defensif Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media. Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan

kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita.

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang berasal dari kata Stratos yang militer, dan Ag yang artinya memimpin. Sebagai sesuatu yang dikerjakan strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh para seseorang untuk memenangkan sesuatu. Menurut Child (1972), strategi adalah sekumpulan pilihan dasar mengenai tujuan dan cara dari bisnis. Sedangkan menurut Chandler (1962), strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan dan penetapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.

Jika merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy. 1) Enterprise Strategy Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik

terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 2) Corporate Strategy Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. 3) Business Strategy Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. 4) Functional Strategy Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain.

Strategi pengembangan jagung di Kecamatan Batang perlu didasarkan pada dukungan teknologi dan pendekatan partisipatif. Dukungan teknologi dibutuhkan untuk membuat sistem usaha tani menjadi lebih efektif dan efisien serta berdaya hasil tinggi, sedangkan pendekatan partisipatif ditujukan agar masyarakat dapat ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan atau secara aktif melakukan pemahaman tentang kondisi kehidupan mereka sehingga tercipta rencana dan tindakan yang berhasil guna (Saragih 2002). Strategi pengembangan jagung di wilayah ini adalah mitra usaha dan inovasi teknologi. Mitra usaha dibutuhkan untuk menampung hasil dengan harga yang kompetitif, dan menyediakan sarana produksi dengan harga terjangkau dan tersedia saat dibutuhkan. Inovasi teknologi ditekankan pada penerapan teknologi secara maksimal seperti penggunaan bibit. Harga benih jagung hibrida yang lebih mahal dibanding benih jagung komposit, menurut Bahtiar *et al.* (2002) dapat disiasati

dengan menanam benih dari pertanaman sendiri (F2), karena hasilnya tidak jauh berbeda dibanding menggunakan varietas hibrida (F1). Inovasi teknologi lain yang disarankan pada wilayah ini adalah peningkatan IP dan penerapan konsep pengelolaan tanaman dan sumber daya secara terpadu (PTT). Peningkatan IP dimungkinkan karena telah tersedia sarana irigasi. Di beberapa daerah di Jawa, pengembangan jagung di lahan sawah irigasi memberikan keunggulan komparatif yang lebih baik dibandingkan di lahan sawah tadah hujan maupun lahan kering. Masalah dalam pengembangan jagung di lahan sawah adalah genangan air setelah panen padi sehingga jagung tidak dapat segera ditanam. Akibat terlambat tanam, tanaman berpeluang mengalami kekeringan pada fase generatif.

Pengembangan dilakukan karena ketersediaan lahan kering yang relatif luas, secara sosial jagung telah diterima oleh masyarakat walaupun masih dalam luasan relatif kecil, dan secara ekonomi menguntungkan karena pasar dalam dan luar negeri masih besar. Dukungan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produksi. Strategi pengembangan jagung di Kecamatan Batang ditekankan pada peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam (ekstensifikasi), perbaikan teknik budi daya jagung varietas lokal, introduksi varietas unggul tahan kekeringan seperti desa maccini baji, kaluku dan desa bungeng. Introduksi teknologi pengairan alternatif seperti pembuatan embung dan pompanisasi air permukaan, serta kemitraan untuk merangsang sistem usaha tani jagung di pedesaan.

Banyak kegunaan tanaman jagung selain sebagai makanan tetapi jagung dapat dijadikan sebagai tepung, jagung rebus, jagung bakar dan lain-lain sehingga

dapat meningkatkan permintaan untuk tanaman jagung. Semakin banyak permintaan pasar maka akan meningkatkan jumlah permintaan sehingga produksi tanaman atau barang akan semakin menurun karena stok barang semakin menipis serta meningkatkan harga barang. Jagung juga mengandung karbohidrat yang sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Keunggulan komparatif dari tanaman jagung banyak diolah dalam bentuk tepung, makanan ringan atau digunakan untuk bahan baku pakan ternak. Hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan perkembangan industri pengolah jagung dan perkembangan sektor peternakan, permintaan akan jagung cenderung semakin meningkat

5. Peran Pemerintah melalui Departemen Pertanian Indonesia

Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga Negara. Berkenaan dengan peranan pemerintah, Ndraha (1987:110) mengemukakan bahwa sesungguhnya peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideology dan spiritual. Rasyid (2000:48) juga mengatakan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu pelayanan (*esrvice*), pemberdayaan (*empowerment*, dan pembangunan (*development*). Dalam hubungan tersebut, Rasyid (2000:48) menjelaskan, bahwa pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong

kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satunya akibat mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di pedesaan, karena dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional adalah dimana aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan kekerabatan dan komunitas. Pemenuhan ekonomi merupakan tanggungjawab kelompok-kelompok komunal genealogis. Ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit (Saptana, dkk, 2003).

Peranan pemerintah itu adalah sejalan dengan definisi yang dinyatakan oleh Ndraha, 1987:177 bahwa "Pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melaksanakannya sendiri". Pembangunan merupakan sebagian dari fungsi utama pemerintahan yang ditujukan untuk memecahkan masalah dari tuntutan masyarakat melalui aktivitas pemerintahan.

Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pertanian menyusun berbagai konsep dan strategi yang berhubungan dengan pertanian, petani samai dengan kondisi pangan di Indonesia. Adapun peran pemerintah dalam hal ini antara lain:

- a) Skim pelayanan Pembiayaan Pertanian yang merupakan skim kredit atau pembiayaan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Indonesia dengan

Bank khusus melayani pembiayaan petani yang mempunyai keluhan dalam hal ekonomi.

- b) Program peningkatan pendapatan petani yang dirancang untuk meningkatkan
- c) kesejahteraan pendapatan petani miskin melalui inovasi pemasaran hasil.

Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada langkah-langkah kebijakan yang harus diambil dalam pembangunan pertanian. Langkah langkah kebijakan yang harus diambil tersebut meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian Trimatra Pembangunan Pertanian yaitu kebijakan usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu, di samping itu juga harus diperhatikan tiga komponen dasar yang harus dibina yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan di mana kegiatan pertanian berlangsung. Pembinaan terhadap petani diarahkan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditi hasil pertanian diarahkan berfungsi sebagai sektor yang menghasilkan bahan pangan, bahan ekspor dan bahan baku bagi industri. Pembinaan terhadap wilayah pertanian bertujuan dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah (Tricahyono, 2003).

Untuk itu diperlukan peningkatan akses terhadap informasi pertanian, dukungan pengembangan inovasi pertanian, serta upaya pemberdayaan petani. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan, pengembangan kelembagaan serta perbaikan sarana/prasarana yang dibutuhkan di desa, merupakan alternatif dalam pemberdayaan petani untuk meningkatkan

kemampuan inovasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sangatlah baik walaupun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya.

6. Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangnya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas daripada organisasi demikian pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu

sendiri (Hasibuan, 2007:85). Menurut Mc. Farland (Handayani, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayani (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayani juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, Guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan dalam rangka

inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejaga dan pengaman. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, Guna

menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejalan dan pengaman. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyesuaian unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, material dan fisik, dan aspek manajerial. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang relative tertutup, mempunyai keterkaitan dengan alam yang tinggi, melakukan kegiatan produksi yang bersifat *subsistence*, memperoleh pelayanan social yang sangat minim

sehingga menghasilkan tingkat kualitas SDM yang relative sangat rendah. Tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana mestinya.

Strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan dilakukan dengan mewujudkan ke empat elemen pemberdayaan masyarakat. Inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, profesionalitas pelaku pemberdaya. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan adalah pengetahuan yang terbatas, wilayah yang sulit dijangkau, dan pemahaman adat. Untuk dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional.

8. Faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah daerah dalam pengembangan petani jagung

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani jagung antara lain:

- a) Tanah atau lahan pertanian, banyaknya lahan kosong yang disia-siakan serta keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha besar menjadikan lahan pertanian semakin menurun.
- b) Harga-harga pupuk, bibit, peralatan pertanian dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh petani biasanya tidak sebanding dengan pendapatan petani itu sendiri.

- c) Peraturan perundangan sangat penting pengaruhnya dalam peningkatan kesejahteraan petani.
- d) Peran aparat pemerintah dan organisasinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara menjalankan berbagai kegiatan agar mampu menunjang kesejahteraan petani.

Hasil tanaman jagung juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masih belum optimalnya penyebaran varietas unggul dimasyarakat, pemakaian pupuk yang belum tepat, penerapan teknologi dan cara bercocok tanam yang belum diperbaiki. Usaha untuk meningkatkan produksi tanaman jagung adalah peningkatan taraf hidup petani dan memenuhi kebutuhan pasar maka perlu peningkatan produksi jagung yang memenuhi standar baik kualitas dan kuantitas jagung yang dihasilkan tetapi dalam melakukan hal tersebut perlu mengetahui atau memahami karakteristik tanaman jagung yang akan ditanam seperti morfologi, fisiologi dan agroekologi yang diperlukan oleh tanaman jagung sehingga dapat meningkatkan produksi jagung di Indonesia.

9. Problematika Sektor Pertanian

Sebagian besar petani di Indonesia dikategorikan sebagai petani gurem, dengan penguasaan asset produksi minimal dan jauh dari memadai untuk suatu usaha yang layak bagi pemenuhan pendapatan keluarga. Dari keadaan ini tercermin bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan pada hasil pertaniannya. Upaya-upaya peningkatan pendapatan petani dari usaha tani yang diusahakan perlu di tambahkan dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bekerja di luar usaha tani atau di luar

sektor pertanian. Fenomena ekspansi sektor industri mendorong terjadinya proses transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Proses transformasi ini akan berhenti manakala tingkat upah di sektor pertanian mendekati tingkat upah di sektor industri.

Fenomena ini menyebabkan luas lahan pertanian produktif relatif semakin sempit karena terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian untuk kebutuhan pemukiman industri infrastruktur jalan dan lain-lain. Ledakan jumlah penduduk menyebabkan krisis terhadap tersedianya lahan pertanian karena terjadinya alih fungsi lahan yang kecenderungan semakin meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan persoalan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak kentara suatu keadaan yang ditimbulkan karena petani semakin kehilangan lahan pertanian serta dalam jangka panjang krisis sektor pertanian akan menyebabkan terjadinya kemiskinan di pedesaan. Namun yang perlu di kritisi adalah bahwa peningkatan produksi pertanian lebih banyak karena upaya intensifikasi pertanian melalui panen 1 atau 2 kali setahun dan ekstensifikasi pertanian dengan memperluas lahan pertanian sementara relatif masih sedikit yang berkaitan dengan upaya aplikasi teknologi. Hal ini cukup merisaukan karena tekanan kebutuhan lahan yang cukup tinggi menyebabkan lahan pertanian semakin termarginalkan dan bergeser ke daerah yang tingkat produktifitasnya lebih rendah. Implikasi yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah terjadinya penurunan dan perlambatan produksi pertanian khususnya produksi padi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil antara lain:

- 1) Lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha tani yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal petani masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha tani sebelumnya. Untuk memodali usaha tani selanjutnya petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjatuh pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.
- 2) Ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah sebagai faktor produksi utama dalam pertanian. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani.
- 3) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya.
- 4) Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan.

- 5) Lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (top down) dan panyaluran inspirasi (bottom up) para anggotanya.
- 6) Kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri.

10. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sektor Pertanian

Masa depresi ekonomi tahun 1930-an merupakan awal kebijakan pengendalian langsung harga jagung oleh pemerintah penjajahan Belanda. Awal tahun 1933 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor jagung melalui cara lesensi dan pengawasan harga secara langsung. Sekitar tahun 1939 dibentuk badan pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap produksi dan pemasaran jagung yaitu *stichting het voedings middels fonds* (VMF) pada masa orde lama kebijakan pangan dilakukan pemerintah dalam bentuk pemberian gaji sebagian berupa jagung dengan tujuan mempertahankan pendapatan riil masyarakat. Pada tahun 1959 digulirkan program padi sentral untuk mewujudkan sasaran swasembada pangan namun program ini gagal. Pada tahun 1963 diselenggarakan program penyuluhan pertanian yaitu BIMAS melalui panca usaha tani yaitu penggunaan dan pengendalian air yang baik, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida yang rasional, cara bercocok tanam yang tepat dan lembaga koperasi yang kuat.

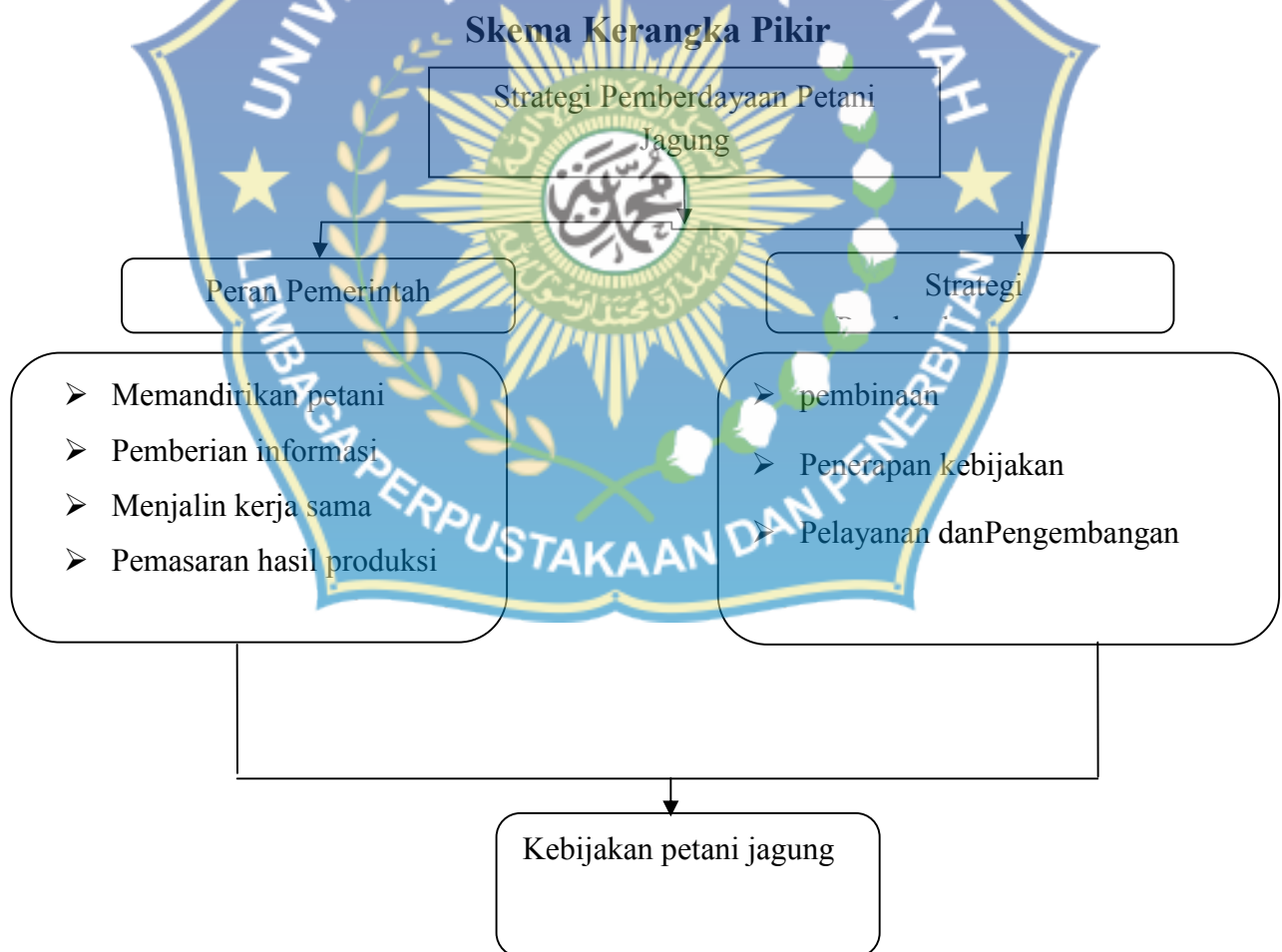
endidikan memainkan peranan yang penting dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan melalui tiga saluran yakni dimana tingkat pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas di sektor pertanian itu sendiri. Kemudian, pendidikan juga berhubungan dengan semakin luasnya pilihan bagi petani untuk bisa bergerak di bidang usaha di samping sektor pertanian itu sendiri yang pada gilirannya juga akan dapat meningkatkan investasi di sektor pertanian. Terakhir, pendidikan juga berkontribusi terhadap migrasi pedesaan – perkotaan. Namun demikian di India, Uganda, dan Ethiopia migrasi terjadi antar desa. Buruh tani yang berpendidikan di Bolivia dan Uganda lebih memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hal upah yang lebih baik (Mosley, 2004).



B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, dan kajian teori. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam konsep kerangka pikir ini dapat digambarkan kontribusi strategi pemerintah terhadap petani jagung di desa Maccini Baji.

Strategi pemerintah dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan peran pemerintah terhadap usaha petani. Sedangkan petani jagung dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan (hasil) yang dilakukan oleh para petani jagung. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada kerangka pikir di bawah ini:



Gambar: Bagan kerangka pikir

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam menentukan rancangan penelitian, selain rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang masalah, rancangan penelitian harus memiliki nilai rasional dalam menentukan tujuan dan teori yang digunakan, sehingga fokus penelitian dapat disesuaikan.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :”Strategi pemerintahan daerah dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto”.

D. Variabel Kebijakan, Pendidikan, dan Bantuan

1. Kebijakan yaitu semoga pemerintah terus membela hak-hak petani agar kesejahteraan meningkat, kerana dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka secara otomatis meningkat pula ketahanan pangan di Indonesia.
2. Pendidikan: mitra usaha yang dibutuhkan untuk menampung hasil dengan harga kompotitif, yang menyediakan saran produksi dengan harga terjangkau dan tersedia saat dibutuhkan.
3. Bantuan yaitu guna mendorong produktivitas petani menjadi lebih baik, serta bantuan tersebut terdiri dari berbagai bentuk, yaitu:
 - 1) Peralatan bertani
 - 2) Benih
 - 3) Pupuk
 - 4) Organik cair
 - 5) Traktor

4. Faktor penghambat iklim merupakan keadaan di mana yang sangat menentukan sehingga tidak semua tanaman dapat tumbuh pada setiap iklim.
5. Faktor penunjang peran aparat pemerinthana dan organisasinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara menjalankan berbagai kegiatan agar mampu menunjang kesejahteraan petani.
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani yaitu penggunaan dan pengendalian bibit unggulan, penggunaan pupuk, dan pestisida yang rasional, cara bercocok tanam yang tepat dan lembaga koperasi yang kuat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

- a) Waktu penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus-18 Oktober 2016.
- b) Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana mestinya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan analisis. Jadi, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder.

C. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala dinas Pertanian	1 orang
2.	Kepala desa Maccini Baji	1 orang
3.	Masyarakat Petani	5 orang
4.	Penyuluh Lapangan	1 orang
	Total Informasi	9 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai lokasi penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data, dalam rangka analisis masalah penelitian.

3. Teknik wawancara

Menurut Nasution, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi tanya jawab dengan petani secara langsung.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Singarimbun dan Efendi (1982) menyatakan bahwa “analisa data merupakan proses data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder.

F. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini,

digunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang, yakni mengadakan pengecekan data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut Soehartono (2002:57), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi.

1. Triangulasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
2. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.
3. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

a. Batas Wilayah

Kecamatan Batang merupakan salah satu dari 11 kecamatan di kabupaten Jeneponto dengan ibu kota kecamatan di Togo-Togo dan berbatasan dengan kecamatan Kelara di sebelah utara, kecamatan Tarowang sebelah timur, kecamatan Binamu di sebelah barat dan kecamatan Arungkeke di sebelah selatan.

Sebanyak satu desa di Kecamatan Batang merupakan daerah pantai dan 5 desa/kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam antara 0-999 meter sebanyak 1 desa/kelurahan dan 5 desa/kelurahan lainnya berada pada ketinggian 0-500 meter.

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ibu kota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke Ibukota kecamatan maupun ke Ibukota kabupaten berkisar 1-21 km. Untuk jarak terjauh Bontoraya yaitu sekitar 21 km dari Ibukota Kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Camba-Camba dan Desa Maccini Baji yaitu sekitar 7 km.

b. Luas Wilayah

Kecamatan batang terdiri dari 6 desa/kelurahan dengan luas wilayah 33,04 km². Dari luas wilayah tersebut nampak bahwa Desa Togo-Togo memiliki

wilayah terluas yaitu 7,94 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Bungeng yaitu 3,60 km².

4. Keadaan Iklim

Hasil pencatatan hari hujan dan curah hujan di Kecamatan Batang menunjukkan rata-rata hari hujan selama setahun sebanyak 8 hari sedangkan curah hujan sebanyak 140 mm.

2. Profil Kepegawaian

a. Aparat Pemerintah

Kegiatan pemerintah di kecamatan batang dilaksanakan oleh sejumlah aparat/pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintah yang jumlah 96 orang, terdiri atas 74 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

b. Perkembangan Desa/Kelurahan

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di kecamatan batang tahun 2008 terdiri dari 6 desa/kelurahan dengan klasifikasi swakarya dan 4 desa kelurahan lainnya tergolong swasembada.dengan demikian tidak ada lagi desa/kelurahan yang termasuk swadaya. Namun demikian masih ada 2 desa yang termasuk kategori tertinggal yakni desa Maccini Baji dan Kaluku karena tingkat perkembangan desa termasuk lamban.

c. Lembaga/Organisasi Tingkat Desa

Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di Kecamatan Batang dengan sejumlah anggotannya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi LPD, BPD, P3A dan PKK masing-masing terdapat 1 unit pada setiap desa/kelurahan sedangkan organisasi

keagamaan seperti remaja mesjid sekitar 31 kelompok dan pondok pengajian sekitar 12 kelompok.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Kurun waktu tahun 2005-2008 jumlah penduduk Kecamatan Batang cenderung meningkat, hasil registrasi bahwa jumlah penduduk akhir tahun 2005 sekitar 19,281 jiwa dan terakhir pada tahun 2008 sekitar 19,304 jiwa.

Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk sekitar 9,288 jiwa dan perempuan sekitar 10.016 jiwa sex rasio 93, berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 93 orang penduduk laki-laki.

b. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2008 adalah 584 jiwa per km² sedangkan tahun 2007 adalah 581 jiwa per km². Ditinjau menurut Desa/Kelurahan maka kepadatan penduduk tertinggi adalah desa Bungeng yaitu 960 jiwa per km², menyusul desa Maccini Baji sekitar 614 jiwa per km², dan Desa/Kelurahan Camba-Camba 590 jiwa per km² selanjutnya Desa/Kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah di Kelurahan Bonto Raya sekitar 415 jiwa per km².

c. Perkembangan Rumah Tangga

Pada tahun 2008 adalah 4.228 rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga rata-rata 5 jiwa per rumah tangga.

d. Mata Pencaharian

Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 3.181 orang adalah petani pangan sedangkan peternak sebanyak 131 orang. Petani tambak dan nelayan sebanyak 154 orang. Penduduk yang bekerja diluar sektor pertanian antara lain perdagangan sebanyak 245 orang, industri 15 orang, angkutan 125 oaran dan jasa hanya 93 orang adapun penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan ABRI sebanyak 283 orang.

4. Karakteristik Obyek Penelitian

a. Jenis kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka pada dasarnya laki-laki masih memiliki peranan besar dibandingkan wanita. Kondisi ini berkaitan langsung dengan posisi laki-laki yang menjalankan usaha ini secara turun temurun. Alasan sebagian responden menggeluti profesi ini yaitu selain mampu menghasilkan pendapatan pribadi, juga menambah pendapatan keluarga. Dari 5 responden petani garam , 5 atau 100% adalah laki-laki dan 0% adalah wanita.

Tabel 2. Distribusi Persentase Responden Petani Jagung Di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki laki	100	100 %
Wanita	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2016.

b. Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja menunjukkan rata-rata pekerja yang sudah menjalani propesi hidupnya sebagai petani jagung dalam jangka waktu tertentu yang diukur dalam satuan tahun. Para Petani Jagung di Kecamatan Batang, rata-rata mempunyai pengalaman kerja selama 9 – 20 tahun sebanyak 1 orang atau 17 %.

Selanjutnya, petani jagung yang bekerja selama 21 – 30 tahun sebanyak 1 orang responden atau 27%. Untuk responden yang bekerja sebagai petani jagung selama 31 – 40 tahun berjumlah sekitar 2 orang atau 27% dari 100 responden yang di teliti. Sedangkan untuk responden yang bekerja selama 41 – 62 tahun sebagai petani tambak garam itu berjumlah 1 orang responden atau 29% dari total keseluruhan responden yang telah di teliti.

Table 3. Distribusi Presentase Responden Petani Jagung Di Kecamatan Batang Menurut Status Tenaga Kerja.

Pengalaman kerja	frekuensi	presentase
9 – 20 tahun	1	17%
21 – 30 tahun	1	27%
31 – 40 tahun	2	27%
41 – 62 tahun	1	29%
jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2016.

c. Status Tenaga Kerja

Status tenaga kerja berkaitan dengan tenaga kerja yang petani gunakan, apakah menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga atau tenaga kerja yang berstatus buruh. Untuk Petani Jagung di Kecamatan Batang, pada umumnya mereka bekerja sendiri tanpa bantuan dari anggota keluarga dalam melakukan proses pengolahan, dimana sebanyak 2 orang responden atau sebesar 35%

berstatus bekerja sendiri. Sedangkan, sebanyak 3 orang responden atau 65% Petani Jagung di Kecamatan Batang bekerja dibantu oleh anggota keluarga mereka.

Tabel 4. Distribusi Presentase Responden Petani Jagung Di Kecamatan Batang Menurut Pengalaman Kerja.

Status tenaga kerja	frekuensi	presentase
Bekerja sendiri	2	35%
Bekerja dibantu anggota keluarga	3	65%
jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2016.

B. Peran Pemerintah Terhadap Kebijakan Petani Jagung di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang menjadi tujuan dari setiap pemerintah. Di wilayah desa peranan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa dan dijalankan oleh Kepala Desa di bantu Perangkat Desa dalam hal memandirikan dan memberdayakan masyarakat khususnya kepada masyarakat petani. Sehingga melalui peranan pemerintah daerah dalam bentuk perhatian aktif oleh pemerintah desa akan tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam memandirikan petani dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan pemerintah daerah, diantaranya adalah dengan memberikan pembekalan kepada petani tentang budi daya tanaman secara benar dan baik. Selain itu untuk memandirikan petani diadakan pula pendekatan – pendekatan langsung antara pemerintah desa dengan kelompok tani dalam melakukan pengarahan dan

sosialisasi tentang pola tanam pada usaha pertanian. Di samping itu juga diadakan pengarahan dari Dinas Pertanian di Kabupaten Jeneponto dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab mandiri pada kelompok tani untuk mengembangkan usaha pertanian.

Secara geografis dan topografis keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto memang kurang diuntungkan. Seluruh wilayah berada di daerah ‘bayangan hujan’ sehingga frekuensi dan intensitas hujan lebih banyak tumpah di bagian utara, kecuali apabila konsentrasi pembentukan awan hujan terjadi bersamaan baik di bagian utara dan bagian selatan gunung Lompobattang. Akibatnya periode musim hujan relatif singkat dan intensitasnya pun relatif rendah. Di Kecamatan Kelara terdapat potensi sumber air yang sebenarnya tersedia cukup melimpah untuk memasok keperluan pengairan dan kebutuhan air minum. Beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Binamu, Bangkala dan Bangkala Barat terdapat alur sungai yang cukup besar dengan debit air memadai.

Keberadaan sumberdaya air ini baru mulai dimanfaatkan pada periode tahun 1990-an khususnya untuk pasokan air minum di ibukota kabupaten. Akan tetapi di beberapa kecamatan lain yang letaknya di atas 100 m dari permukaan laut, pasokan air menjadi semakin sulit dan langka, sebagai akibat belum terbangunnya jaringan sekunder dan tersier keseluruhan wilayah. Masyarakat Jeneponto sebenarnya dapat dikategorikan sebagai komunitas yang ulet dan tidak mudah menyerah dengan kondisi alam yang kurang bersahabat. Kelompok masyarakat yang memiliki aset berupa tanah sawah, ladang atau ternak umumnya tetap

bertahan untuk melestarikan hubungan kekerabatan, budaya dan adat (siri' dan sipakatau : menjunjung etika dan silaturahmi). Sedangkan yang kurang memiliki ketrampilan dan pendidikan terbatas berjuang di sektor informal. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan tentang peranan pemerintah yang harus dilakukan dalam memberdayakan masyarakat petani jagung di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang dalam bidang pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Peranan pemerintah desa dalam memandirikan petani jagung

Peranan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam memandirikan petani dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan pemerintah di Kelurahan Togo-togo Kabupaten Jeneponto, diantaranya adalah dengan memberikan pembekalan kepada petani tentang budi daya tanaman secara benar dan baik. Selain itu untuk memandirikan petani diadakan pula pendekatan-pendekatan langsung antara pemerintah dengan kelompok tani dalam melakukan pengarahan dan sosialisasi tentang pola tanam pada usaha pertanian. Di samping itu juga diadakan pengarahan dari Dinas Pertanian kabupaten Jeneponto dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab mandiri pada kelompok tani untuk mengembangkan usaha agribisnis pertanian. Indikator sikap dalam kemandirian kelompok tani akan terbentuk melalui keaktifan dan kekreatifan petani dalam melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimilikinya utamanya dalam usaha pertanian. Peranan pemerintah desa dalam memandirikan petani tentunya melalui keikutsertaan petani untuk terlibat aktif pada kegiatan pertanian yang dimilikinya. Sesuai dengan pemaparan dari Kepala Dinas Pertanian mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program ini tentunya mendapat respon dari petani yang sangat positif karena petani pada penasaran. Untuk petani nya sendiri pada awal-awal diadakannya penyuluhan program, malah sangat antusias karena penasaran. Sebelumnya petani itu banyak yang menanam padi.Tapi sejak adanya program ini petani itu jadi penasaran dan banyak yang ikut-ikutan bercocok tanam jagung karena di rasa berguna dan bernilai jual.Yang jelas dengan adanya program tersebut, lahan-lahan atau sawah dan kebun yang tidak difungsikan dengan adanya program ini bisa memanfaatkan lahan atau pematang yang selama ini tidak di gunakan. Selain itu lahan yang di miliki para petani dapat di kembangkan dan di kelola dengan baik oleh petani. Dengan adanya program dari pemerintah dapat menambah penghasilan bagi petani dengan terpenuhi kebutuhan keluarganya walau tidak secara menyeluruh tapi sedikit dapat membantulah.” (Wawancara AN, 2 januari 2017)”.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh AN selaku Kepala Dinas Pertanian Jeneponto menyatakan bahwa keaktifan petani terjadi pada awal dilaksanakannya program. Hal itu disebabkan karena penasaran dari pihak petani untuk menanam tanaman hortikultura yang sebelumnya tidak ditanam oleh petani di area lahan (sawah) nya. Namun sejak adanya program ini lahan-lahan atau sawah yang sebelumnya tidak digunakan kini menjadi lahan produktif yang berkembang dan bermanfaat bagi kebutuhan para petani. Melalui hasil yang didapatkan, para petani bisa mandiri dan berani mengambil keputusan dalam berwirausaha tani serta memiliki antusias secara aktif dan kreatif dalam bercocok tanam. Senada dengan pemaparan AN selaku Kepala Dinas Pertanian, RY selaku Sekretaris Kelurahan sebagai koordinator lapangan memaparkan :

“Kemandirian petani yang berada di Kecamatan Batang ini cenderung pasif untuk saat ini. Padahal dulu pada awal adanya program para petani di desa ini aktif karena penasaran. Dari faktor penasaran itulah dari tahun ketahun para petani itu terus aktif dalam mengembangkan usaha mereka mulai dari menanam, membuat bibit pertanian, dan membuat pupuk. Namun ketika harga kebutuhan pokok pada anjlok dan mengalami ketidakstabilan harga, petani sudah kurang antusias lagi dalam menanam dan mengembangkan pertanian mereka. Bila dibandingkan dengan desa lain dalam lima tahun belakangan ini lebih antusias dan aktif dalam

mengembangkan hasil produksi pertanian mereka. Ya sebab harga kebutuhan pokok yang melambung dan tidak stabil itu, petani yang ada di Kecamatan Batang sekarang malah malas dalam mengembangkan hasil kebutuhan pokok pertanian. Padahal di kecamatan sini sudah difasilitasi, sekarang kembali ke kesadaran petani sendiri saja. Karena dari pihak pemerintah tidak ada paksaan, kedepannya juga demi kesejahteraan mereka sendiri.” (Wawancara RY, 2 Januari 2017)”.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh RY selaku Sekretaris kelurahan menyatakan bahwa tentang kemandirian petani khususnya di Kecamatan Batang hanya terlihat pada tahun awal diadakannya program. Namun, pada tahun 2014 ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan timbul ketidaks tabilan pada kebutuhan pokok sehari-hari menjadikan antusias dan minat petani di Kecamatan Batang mengalami penurunan. Sehingga untuk saat ini hanya beberapa orang saja yang tetap mempertahankan kegiatan bercocok tanam.

2. Peranan pemerintah desa dalam pemberian informasi pada petani

Peranan pemerintah desa Medang kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dalam memberikan informasi terkait dengan usaha pertanian agribisnis memang sangat bermacam-macam. Dalam pemberian informasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai cara memang dapat memudahkan untuk lebih diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyikapi hal tersebut peranan pemerintah desa perlu untuk ditegaskan demi memberdayakan kelompok tani di desanya. Berbagai cara dan Tindakan yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan pemberian informasi pada petani melalui sosialisasi dan rapat pertanian yang bersifat menyeluruh dan merata. Selain itu tindakan dan cara yang di bentuk pemerintah desa adalah dengan promosi usaha agrobis melalui sms, blog, dan brosur serta memberikan informasi juga secara langsung atau yang dikenal dengan *face to*

face. Sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh RY selaku Sekretaris

Kelurahan :


“Iya kalau pemberian informasi pada pemerintah dengan musyawarah dan diberikan sosialisasi dalam rapat pertanian yang membahas tentang pertanian yang ditujukan kepada seluruh petani dan perangkat desa. Rapat pertanian disini itu diadakan setiap tiga bulan sekali tergantung dari kebutuhan pertanian. Selain itu untuk informasi lanjut saya melakukan pertemuan langsung bertatap muka dengan petani, terkadang ya petani nya sendiri yang berkonsultasi kepada saya. Jika permasalahan pertanian yang bisa di bantu ya saya bantu. Kan itu semua juga demi petani agar dapat sejahtera. Dan saya juga selalu memberikan informasi pada setiap petani mengenai harga.” (Wawancara RY, 3 januari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pemberian informasi pada kelompok tani sudah cukup maksimal, walaupun belum berjalan dengan baik dikarenakan para petani mengharapkan rutusnya diadakan penyuluhan dan pelatihan melalui musyawarah rapat dan tatap muka langsung. Sehingga pemberdayaan petani jagung yang ada di Kecamatan Batang semakin berjalan dengan baik.

3. Peranan pemerintah desa dalam menjalin kerja sama

Peranan Pemerintah Daerah di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dalam menjalin kerja sama begitu penting. Mengingat diadakannya suatu program tentunya melibatkan banyak pihak yang terkait di dalamnya. Kerja sama yang diberikan oleh pemerintah dalam mengembangkan hasil produksi pertanian telah berkembang dari hulu sampai ke hilir. Dengan itu kerja sama yang di bantu oleh pemerintah dengan pihak-pihak yang terlibat dapat berjalan hingga saat ini. Dalam usaha kerja sama tersebut terbentuk melalui berbagai cara dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa diantaranya adalah dengan melakukan kerja sama dengan tengkulak, pasar, dan penyedia bibit-bibit pertanian dari berbagai daerah.

Dengan adanya kerja sama yang terbentuk timbul sikap saling gotong royong dan membantu dengan berbagai kalangan. Berikut pemaparan BS selaku koordinator lapangan tentang kerja sama yang beliau lakukan:

“Untuk jalinan bekerja sama kami itu, kami melakukan dengan banyak kalangan. Kerja sama kami dengan para petani yang ada di kecamatan batang dan desa-desa lain di sekitarnya. Selain itu juga saya melakukan kerja sama musiman dengan tengkulak dan juga pasar. Kerja sama musiman ini tergantung pada keadaan musim tani, kalau musim penghujan begini tingkat produksi tanaman meningkat begitupun juga hasil pertaniannya, namun jika musim kemarau kami mengurangi jumlah produksi pada pasar. Tapi tetap kami melayani berbagai keluhan tentang pertanian dan membantu untuk mengatasinya. Kerja sama yang kita jalin hingga saat ini dengan berbagai pihak, formulator obat-obatan pertanian, dan penyedia bibit-bibit pertanian. Nah disini kerja sama kami bersifat menyeluruh. Jadi kalau ada info-info tentang harga jual dari pihak-pihak itu menghubungi saya untuk memberikan informasi.” (Wawancara :BS,4 januari 2017)”.


Berdasarkan petikan wawancara yang dilakukan dengan BS selaku koordinator lapangan, menyatakan bahwa dalam menjalin kerja sama beliau selaku perpanjangan tangan pemerintah desa telah menjalin kerja sama dengan dari hulu sampai ke hilir. Jalinan kerjasama yang terbentuk antara pemerintah desa dengan berbagai kalangan telah terbentuk secara menyeluruh. Kerja sama yang dilakukan pemerintah desa bukan hanya dari kelompok tani saja melainkan juga dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya baik tengkulak, pasar, bank dan formulator obat-obatan demi mendukung berkembangnya usaha pertanian dan peningkatan hasil produksi.

4. Peranan pemerintah desa dalam pemasaran hasil produksi

Salah satu peranan Pemerintah Daerah di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto yang sangat penting pada pemberdayaan petani jagung adalah melalui berbagai tindakan yang dibentuk dalam pemasaran produksi hasil berupa

penjualan dan budidaya tanaman jagung. Tindakan dan cara yang terbentuk melalui kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memasarkan hasil produksi pada berbagai pasar dan tempat-tempat produksi. Berbagai produksi yang dipasarkan adalah mulai dari hasil panen jagung dan bibit jagung.

Melalui peranan pemerintah daerah pada pemberdayaan petani jagung terkait dengan pemasaran hasil produksi jagung, sikap pemerintah daerah masih belum stabil di karenakan pemerintah daerah belum bisa menyeimbangkan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok dipasaran. Hal demikian di sebabkan harga kebutuhan pokok di pasar kurang stabil dan mengalami pasang surut. Sehingga berdampak pada penjualan hasil panen petani yang menurun. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto tentang pemasaran hasil produksi sebagai Berikut :

“Untuk bibit jagung biasanya petani dari desa lain sendiri yang datang kemari untuk membeli bibit nya. Tapi kalau penjualan hasil produksi yang di dapatkan dari para petani saya menjualnya lewat pengepul secara langsung. Biasanya para tengkulak itu datang sendiri yang datang untuk membeli berbagai hasil pertanian yang akan di jualnya kembali. Jika tengkulak tidak datang, maka para petani sendiri menjualnya ke pasar-pasar. Kalau masalah harga kami mengikuti perkembangan harga kebutuhan pokok masya rakat di pasaran saja nak.” (Wawancara, 8 januari 2017)”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto bahwa dalam pemasaran hasil produksi pemerintah daerah melibatkan petani dalam sebagai penerimaan hasil produksi seperti jagung dan lain-lain. Dengan demikian apabila hasil pertanian melimpah namun penjualan hasil pertanian mengalami penurunan maka pihak dinas pertanian yang membelinya langsung dari petani sembari membantu perekonomian para petani jagung.

Menurut Kartasmita (dalam Zubaedi 2013:9) salah satu upaya pemberdayaan yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat Kajian Moral dan Kewarganegaraan. (*empowering*) salah satunya melalui pembangunan masyarakat yang mampu membuka akses pada bagian peluang lainnya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya, memiliki kekuasaan dan pengetahuan serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pembangunan masyarakat terbentuk melalui pemberdayaan masyarakat petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani menjadi kelompok tani.

Pemberdayaan masyarakat petani yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu upaya pembangunan masyarakat yang terjadi dalam suatu pemerintahan. Berbagai peranan pemerintah daerah terkait dengan adanya usaha pertanian. Selain itu cara dan tindakan yang digunakan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat petani melalui pemberian informasi dan motivasi bagi para petani untuk aktif dan terlibat langsung dalam usaha pertanian menjadi daya minat tersendiri bagi para petani.

Pemberian motivasi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari motivasi intrinsik (dari dalam diri pemerintah daerah seperti pemberian motivasi melalui tatap muka langsung (*face to face*) dan motivasi ekstrinsik seperti pemberian pembekalan kepada petani melalui rapat, kunjungan kerja dan lain sebagainya. Kedua jenis motivasi tersebut dapat memberikan dorongan petani untuk lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian. Kehadiran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani memiliki andil besar utamanya dalam mensejahterahkan petani di Kecamatan

Batang Kabupaten Jeneponto. Sebab pemerintah daerah sebagai pengontrol jalannya tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting mengingat peranan pemerintah daerah tidak sekedar mengetahui saja melainkan terlibat pula pada seluruh rangkaian kegiatan yang dibentuk demi untuk mensejahterahkan masyarakat. Berbagai bentuk tindakan dan perilaku acuh tak acuh sering dijumpai dimasyarakat tentang kurangnya pemanfaatan lahan pertanian sehingga menyebabkan banyak lahan yang tidak difungsikan dan tidak digunakan untuk kepentingan pertanian. Padahal dengan adanya pemanfaatan lahan-lahan atau pematang untuk dikembangkan dalam suatu usaha akan dapat bernilai jual dan menguntungkan sang pemilik lahan. Oleh sebab itu peranan yang diberikan pemerintah daerah terkait dengan pemberdayaan petani yang mandiri, kreatif dan berkembang sangat penting dalam mengikuti perkembangan zaman.

C. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Masyarakat Petani Jagung Di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat petani jagung maka sedikitnya ada tiga strategi yang

harus dilakukan Pemerintah daerah untuk menciptakan iklim dan suasana pemberdayaan kelompok tani yaitu:

1. Pembinaan terhadap Masyarakat

Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali.

Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan,

Kepala Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai

dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantaraarganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai desa yang penduduknya sebahagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani, kegiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotongroyong. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat petani jagung. Sebagaimana hasil wawancara penulis yang dilakukan oleh salah satu aparat Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto menyatakan bahwa:

“Strategi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian kabupaten Jeneponto dalam pemberdayaan petani jagung melalui bantuan benih, baik bantuan benih langsung Benih Unggul (BLBU) maupun benih bersubsidi dan memberikan arahan-arahan tentang pertanian tersebut, bagaimana pemilihan bibit unggul, cara memelihara tanaman jagung dan mengelolah tanah agar tetap subur dan bagaimana cara meningkatkan hasil panen agar lebih banyak dari musim kemusim”. (Wawancara.AN) Tgl 12 Januari 2017”.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu aparat Kecamatan Batang yaitu Bapak Camat yang menyatakan bahwa:

“Strategi yang lakukan pemerintah kecamatan Batang dalam hal pemberdayaan masyarakat petani jagung melalui Kepala cabang dinas pertanian memberikan tugas kepada lembaga-lembaga pertanian agar berperan aktif dan juga memberikan tugas kepada para Penyuluh pertanian lapangan (PPL) di masing-masing desa maupun kelurahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, tentang bagaimana agar para petani dapat meningkatkan hasil produksi jagung”(Wawancara.AN) Tgl 12 Januari 2017”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sangat tidak sesuai jika dibandingkan dengan hasil survei peneliti dilapangan, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu petani jagung yang mengatakan bahwa:

“Pemberian Bantuan yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah dilaksanakan akan tetapi belum sepenuhnya maksimal dan merata kepada kami, biasanya mendapatkan tahun ini, tahun depan tidak mendapatkan lagi”(Wawancara.AN),Tgl 2 Januari 2017”.

Akan tetapi dalam penyaluran bantuan secara bertahap agar dapat merata kepada setiap Desa maupun Kelurahan yang ada di Kecamatan Batang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Cabang Dinas Pertanian yang menyatakan bahwa :

“Dalam pendistribusian Bantuan jagung, saya selaku perpanjangan tangan dinas pertanian memberikan bantuan kepada msasyarakat petani jagung sesuai kebutuhannya akan tetapi tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan karena kelompok tani yang mendapatkan tahun ini tidak mendapatkan lagi tahun depan agar dapat merata kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Batang. ”(Wawancara.AN), Tgl 13 Januari 2017”.

2. Pelayanan Dan Pengembangan Terhadap Masyarakat

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paran didalam pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat. Dilain pihak pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat diharapkan juga memiliki :

- a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya,
- b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan
- c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat
- e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa, masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Maccini Baji yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan dibidang pertanian maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Strategis Pemerintah Daerah dalam pengembangan petani jagung di Kabupaten Jeneponto Kecamatan Batang secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga pilar utama, yaitu pemerintah, pasar dan komunitas. Masing-masing menurut Suswono memiliki pilar paradigma, ideologi, nilai, norma, *rules of the game* dan bentuk keorganisasian sendiri. Antara satu pilar dan lainnya sangat terkait erat. Dan pemerintah pada umumnya menjadi tumpuan sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator berjalannya sistem dan tata hubungan antara tiga pilar utama tersebut.

Istilah “pembangunan pertanian” sendiri memiliki konotasi adanya kepentingan pemerintah atas majunya sektor pertanian yang seringkali berkilah “untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya”. Dalam hal pembangunan pertanian, bentuk dan legitimasi sebuah pemerintahan sangat mempengaruhi seberapa besar makna peran pemerintah dalam mendorong pembangunan pertanian. Sehingga pemerintah sebenarnya memiliki peranan yang cukup penting didalam pertanian. Dimana seharusnya pemerintah berperan aktif terutama dalam memajukan kesejahteraan petani. Walaupun tidak secara langsung setidaknya pemerintah dapat membantu petani dengan cara sebagai fasilitator di dalam membangun pertanian. Secara tidak langsung pemerintah berperan sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah malah mencekik petani. Misalnya

saja; harga pupuk dan bibit yang melambung sedangkan harga jual hasil panen mereka cenderung lebih murah.

Kendala pemerintah daerah dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat petani jagung yang ada di Kecamatan Batang melalui Penyuluh pertanian lapangan yang di berikan langsung kepada kelompok tani. Dalam pendistribusian bantuan biasanya mengalami kendala keterbatasan personil dalam penstribusian bantuan pupuk kepada masyarakat petani jagung di setiap desa maupun kelurahan dan bantuan pun sesuai dengan target di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Bantuan di berikan pemerintah kepada kelompok tani sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Seperti halnya dalam peran pemerintah daerah dalam mengarahkan kepada setiap penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam pembagian bantuan pupuk kepada kelompok tani yang ada di kecamatan Batang agar produksi jagung dapat meningkat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, maka peneliti mengambil kesimpulan tentang hal yang harus dilakukan Pemerintah daerah dan Dinas Pertanian yaitu, bagaimana cara mengatasi permasalahan di bidang pertanian khususnya petani jangung di Kecamatan Batang. Program-program dari Dinas Pertanian harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintahan nasional lainnya, pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam pengimplementasikan program, organisasi produsen di pedesaan yang bergerak dibidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi partner penting demi mendukung proses penting perubahan. Selain dari pada itu, peneliti

juga menarik kesimpulan tentang upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam pencapaian hasil dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Pertama,

Upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua,

Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga,

Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara

saling menguntungkan dan memajukan. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu.

Dalam konteks pemberdayaan petani perlu dilakukan kegiatan-kegiatan mengembangkan kelompok tani sebagai lembaga tani yang tangguh, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui kelompok tani ini dengan memfasilitasi proses pembelajaran petani dan masyarakat pelaku agribisnis, membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan, memberikan rekomendasi dan mengusahakan akses-akses petani ke sumber-sumber informasi dan sumberdaya lainnya demi memecahkan masalah kelompok tani, menjadikan lembaga penyuluhan pertanian sebagai wadah mediasi dan intermediasi terutama menyangkut teknologi untuk kepentingan agribisnis.

Selanjutnya pada bagian ini penulis mencoba menganalisis hasil penelitian dengan menyesuaikan kondisi objektif dilapangan dengan menggunakan pendekatan teori Strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh *(Sunyoto Usman)* :

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang pemberdayaan masarakat petani dalam menghadapi yang kuat. Pemihakan yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan harus terarah atau tepat ditujukan kepada masyarakat petani yang memerlukan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang.

Pemberdayaan masyarakat petani bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat petani khususnya yang ada di Desa Maccini Baji, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Penulis mewawancarai seorang pengurus kelompok tani Desa Maccini Baji dan beliau mengatakan:

“seharusnya, pemerintah desa sebagai pelindung bagi kelompok-kelompok tani atau masyarakat petani yang ada di Desa Maccini Baji harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pemerintah, tidak membiarkan kelompok-kelompok tani atau masyarakat yang sudah ada berakhir tidak jelas”(Wawancara AN), Tgl 2 Januari 2017.

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan faktor utama untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam konteks strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat petani yang ada di Desa Maccini Baji, maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah soal kesejahteraan. Pada bagian ini akan diuraikan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan yang dianggap mampu dan cakap untuk memberikan informasi ilmiah terkait dengan strategi pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat petani, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan dengan inisial AL pekerjaan Tani menuturkan bahwa :

“Perhatian pemerintah Desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat tani di Desa Maccini Baji masih belum dirasakan. Dan saya kira pemerintah Desa juga memiliki strategi untuk mendorong kesejahteraan kami sebagai petani, hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah Desa kurang melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pertanian, bahkan pemerintah Desa juga kurang melakukan lobby untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui dinas terkait. Jadi sejauh ini kami melihat bahwa pemerintah desa perlu ada perhatian khusus bagi masyarakat petani. Karena kalau ini hanya dibiarkan akan berdampak bagi kesejahteraan para petani dan tentunya sangat merugikan masyarakat petani jagung“.(Wawancara A.L),Tgl 2 Januari 2017.

Dari hasil wawancara atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat petani sangat mengharapkan peran Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan perhatian khusus agar kesejahteraan masyarakat petani dapat terwujud.

Pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, hubungan kerja / jaringan kerja, dan keadilan sosial. Karena hal ini merupakan, persyaratan yang memungkinkan setiap orang dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan *existensi* sebuah kelompok dan komunitas. Berangkat dari paradig inilah kemudian pemberdayaan itu menjadi aspek dan ikon penting dalam mendorong kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tugas, fungsi dan peranan yang harus dijalankan dalam memberdayakan petani baik secara langsung seperti pemberian pembekalan dan pengetahuan kepada petani tentang usaha pertanian, maupun secara tidak langsung seperti pemberian modal dalam usaha. Menyikapi hal tersebut, peranan pemerintah daerah perlu untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan dan mensejahterahkan para petani yang berada di

Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Selain itu peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani dapat terbentuk melalui pemberian kemandirian bagi petani, pemberian informasi, motivasi, kerja sama serta pemasaran hasil produksi yang secara tidak langsung dapat membawa petani yang tergabung dalam kelompok tani memiliki daya saing tinggi dalam kemandirian serta kebersinambungan masyarakat yang maju sesuai dengan swasembada masyarakat.

Adapun peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani telah dikaji dengan menggunakan teori pembangunan masyarakat oleh David C. Korten tentang pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yang dapat diterapkan untuk menganalisis hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan. Sesuai dengan teori pembangunan masyarakat David C. Korten, hadirnya pemerintah desa sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan di suatu daerah yang nantinya terwujud dalam tindakan-tindakan maupun program kerja pembangunan masyarakat akan berpengaruh pada pencapaian target dalam pengendalian pemberdayaan masyarakat petani. Pemerintah daerah tidak hanya mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa saja melainkan juga mengatur dalam pemberdayaan kelompok dan masyarakat petani dalam memberikan sosialisasi, pengarahan, bimbingan teknis, dan juga memberikan contoh langsung untuk terlibat dalam usaha pertanian. Menciptakan kemandirian bagi para petani merupakan peranan pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani. Apabila dikaji dengan teori David C. Korten tentang pembangunan yang berpusat

pada manusia (*people centered developmant*) masuk dalam golongan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan harus diletakkan pada masyarakat sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani jagung sebagai berikut:

Strategi pemerintah dalam bantuan modal usaha adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan . Pemerintah Kecamatan Batang melalui Kepala cabang Dinas Pertanian berusaha memfasilitasi para petani agar hasil produksi pertanian dapat meningkat. Peningkatan hasil adalah hal yang selalu diharapkan dalam kegiatan produksi pertanian. Berbicara suatu lokasi yang tetap maka upaya ini dekat dengan aspek intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas bertani dengan berbagi sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil pertanian pada suatu daerah.

Pemerintah Kecamatan Batang melalui cabang dinas pertanian dalam upaya pemberian bantuan modal usaha dalam bantuan benih baik bantuan langsung (BLBU) maupun bantuan benih bersubsidi dan bantuan modal usaha yang di berikan kepada kelompok tani melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan) juga bantuan simpang dengan sumber anggaran Perusahaan Pemberdayaan Agrobisnis Pedesaan (PUAP)

B. Saran

1. Penerapan Kebijakan meningkatkan suatu produktivitas yang di capai melalui perbaikan mutu benih dan pemupukan yang berimbang. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pengairan dan penggunaan alsintan untuk menekan kehilangan hasil pada saat panen.
2. Peningkatan dan keterampilan petani jagung di Kecamatan Batang tingkatan pengelolaan usaha tani masih tergolong semi komersial, jagung yang di hasilkan petani masih digunakan/dimamfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan petani,tidak ada usaha tani yang tidak mengalami perubahan karena usaha tani merupakan suatu proses biologis,fisik, dan kimia yang dapat berubah secara dinamis.
3. Distribusi barang saluran distribusi merupakan lembaga lembaga yang memasarkan produk yang berupa barang atau jasa dari produsen atau konsumen.
4. Pengembangan petani jagung gampang dibudidayakan,produktivitas dan nilai jual tinggi merupakan faktor-faktor yang membuat keuntungan menanam jagung tidak kalah dibandingkan dengan keuntungan menanam padi.Bahkan di beberapa daerah menanam jagung lebih menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAk.1993. *Teknik Bercocok Tanam Jagung*. Kanisius: Yogyakarta
- Anonim. 2004. *Undang- undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Berikut Penjelasannya*. Bandung: Penerbit Fermana.
- Arikunto, Suharsmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Arsyad et.al.1985 dalam Soekartawi. 1999. *Agribisnis, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BPP Pajangan. 2014. *Program Penyuluh Pertanian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Institute For Research and Empowerment. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Izzamurasaki.2012.<http://blog.ub.ac.id/izzamurasaki/2012/10/30/teknologi-budidaya-jagung-hibrida/> diambil tanggal 6 Oktober 2016.
- Kartasapoetra, Ance Gunarsih. 1990. *Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan*. Erlangga: Jakarta.
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Bidang Ketahanan Pangan. 2006. *Buku Putih, Indonesia 2005-2025*.
- Salisbury dan Ross. 1995. *Fisiologi Tumbuhan Jilid Dua Biokimia Tumbuhan Edisi Keempat*. Bandung: ITB.
- Suparto.I. 2010. *Hubungan kepribadian Petani Dalam Pengambilan Keputusan Pola Tanam Tumpang Sari Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Ubi kayu*. Surabaya: Rineka Cipta.
- Rahim, Abd, dan Hastuti, DRD. 2007. *Ekonomika Pertanian*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Widjaja, HAW. 1996. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Ambar Teguh Suistiyani. 2004, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arisandi.1966. *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GayaMedia.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. (2007). *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Elex Meia Komputindo.
- Friedman. 1998. *Kemitraan Suatu Aliansi Strategi*(Makalah). Tidak Diterbitkan, Puspensos Depsos RI Jakarta.



RIWAYAT HIDUP



Arman Nur, Lahir di Jeneponto 23 Juli 1993 dari pasangan Saharuddin dan Sitti Nursiah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SDN 87 Pammessorang, lulus pada tahun 2003, SMP Negeri 2 Paitana lulus pada tahun 2006, SMK Negeri 1 Jeneponto lulus pada tahun 2009. Dan tercatat sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2010.

Prinsip yang selalu dipegang penulis adalah semangat dan terus berjuang.

